

PROFIL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Jakfar Sadik
Universitas Trunojoyo

Abstract

National Development that was held simultaneously with the spirit regional autonomy refer to the three strategy: Pro-Growth, Pro Job, and Pro-Poor Budget which are all at the center of the goals that the make-up of prosperity to eradicate poverty reduction through. Sumenep Regency community people out of Poverty is the majority multidimensional, education primary school students, the access appropriate sanitation and clean water still enjoyed a few people, the people who have not enjoyed the flow of electricity PLN is almost 40% especially in the region the islands, sea transport and rural areas also adopted by less than that inhibit mobility and work in economic activities in the region. Poverty alleviation programs Sumenep Regency region is divided into 3 clusters including: the program social assistance based integrated poverty alleviation programs, family-based pemberdaaan poverty alleviation programs, community-based micro and small business development. From the three clusters have been integrated between the national, provincial and district levels. Many achievement also have been achieved by Poverty alleviation programs in Sumenep Regency area, including; The Education indicators population, The Health community indicators, The Basic Infrastructure, and The indicator for Food.

Keywords: profile, Poverty alleviation

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang diselenggarakan secara serentak melalui semangat otonomi daerah mengacu pada tiga strategi yaitu *Pro Growth*, *Pro Job*, dan *Pro Poor* yang semuanya bermuara pada satu tujuan yaitu memberantas kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multi-dimensi dan multidisiplin yang tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga terkait masalah sosial, budaya, politik dan lain-lainnya. Surut dan meningkatnya kemiskinan suatu daerah tergantung kepada keberpihakan Pemerintah dan perlindungan Negara,

disamping dinamika kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat baik secara global, nasional, regional maupun lokal.

Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan permasalahan kemiskinan di bawah kepemimpinan Drs. KH. A. Busro Karim, M.Si bersama lembaga Legislatif Daerah (DPRD) telah dibuktikan melalui Langkah nyata sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep mengacu pada penyebab kemiskinan daerah yang sangat kompleks berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan secara rutin dan terstruktur melalui lintas sektor, sehingga perspektif dalam melihat permasalahan kemiskinan berdasarkan

persoalan real dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat miskin di Kabupaten Sumenep bukanlah korban pasif dari keadaan. Mereka secara aktif mencari peluang-peluang dan memakai strategi-strategi yang ada untuk memaksimalkan manfaat dari aset yang mereka miliki. Walaupun demikian, keadaan masih kurang berpihak pada mereka. Hal ini disebabkan minimnya kepemilikan aset sumber daya alam yang melekat pada diri mereka, seperti hewan ternak atau tanah. Bahkan jika mereka memilikinya, jumlahnya masih relatif tidak signifikan untuk dapat dikembangkan sebagai sumber kemakmuran di masa yang akan datang.

Sebagaimana dibahas di muka, kepemilikan aset sumber daya dapat memiliki keuntungan ganda. Selain dapat digunakan sebagai aset produktif, aset tersebut juga dapat disewakan, atau dijadikan jaminan ke bank. Hal ini berarti, salah satu cara untuk mendorong masyarakat miskin Kabupaten Sumenep agar dapat *bankable* adalah melalui peningkatan kepemilikan atas aset sumber daya alam tertentu yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan mereka. Tentu saja hal ini tidak lepas dari pola pemberian bantuan dari pemerintah daerah, yang diarahkan dengan fokus yang lebih terstruktur.

Maksud dari lebih terstruktur di atas misalnya, masyarakat dengan basis pengetahuan dan pengalaman petani akan lebih tepat diberikan bantuan berupa kepemilikan sepasang sapi perah/kerbau sebagai bantuan yang sifatnya pemberian dan lahan yang dapat dikelola dengan sistem sewa. Tentunya sewa yang dikenakan mengacu pada harga subsidi, sehingga tidak terjadi pengenaan sewa yang terlalu memberatkan petani miskin di sana. Lebih lanjut, perlu diberikan penyuluhan agar tanah yang disewa

tersebut tidak hanya ditanami tanaman pangan, tetapi juga komoditas dengan nilai jual ekspor tinggi. Kondisi ini pada akhirnya akan memunculkan sebuah pengembangan potensi lokal yang dapat cukup dinamis dalam perkembangannya.

Pengembangan potensi lokal memang telah menjadi isu lintas sektoral dalam aktivitas kelompok-kelompok swadaya, pengambil kebijakan dan *stakeholders* lain di tingkat Kabupaten. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sudah waktunya diberi porsi yang lebih besar dalam mengambil peran. Karena mereka itulah yang secara intens berinteraksi dengan alam sekitarnya. Dari mereka pula dapat diharapkan munculnya **kearifan lokal**, sehingga pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan : (a) tepat sasaran, (b) efektif dan efisien, serta (c) berkelanjutan, karena sesuai dengan harapan dan kebutuhan riil.

Dengan teridentifikasinya akar penyebab kemiskinan dari berbagai faktor dan potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang lebih peduli terhadap pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan (*Pro-poor*), maka ke depan diharapkan tercapai kondisi; (1) berkurangnya jumlah orang miskin, yang dengan sendirinya berkurang pula jumlah daerah tertinggal, (2) menurunnya indeks kemiskinan, yang berarti makin kecil tingkat kedalaman kemiskinan masyarakat, dan (3) laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dapat mengejar masyarakat di daerah yang lebih maju.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menjamin kelangsungan program prioritas penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) menjadi satu kelompok koordinasi yang diberi nama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Keberadaan TKPKD diharapkan mampu mengawal seluruh program

yang telah dirumuskan guna mencapai tujuan yaitu percepatan program prioritas penanggulangan kemiskinan. Realisasi program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan oleh TKPKD bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Realisasi Program Prioritas Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

No	Nama Program	Sumber Dana
A	Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga	
1	Beasiswa Miskin SMA Negeri/Swasta	Pusat
2	Jamkesmas	Pusat
3	Program Keluarga Harapan	Pusat
4	Beras untuk Keluarga Miskin	Pusat
5	BOS	Pusat
5	Bantuan Keuangan Siswa Miskin	Propinsi
6	BOSDA Mandiri	Propinsi
7	JamKesda	Propinsi
8	Beasiswa Perguruan Tinggi	Kabupaten
9	Bantuan untuk Guru Ngaji	Kabupaten
10	Bantuan Kesejahteraan untuk Lansia	Kabupaten
11	Bantuan Sosial untuk Pedagang Eceran Keliling	Kabupaten
12	Bantuan Sosial bagi Orang Terlantar, Cacat, Psikotik, Pemulung dan Keluarga Rentan	Kabupaten
13	Jampersal	Kabupaten
14	Bantuan Renovasi Rumah untuk 150 unit Rumah	Kabupaten
B	Program Penanggulangan Kemsकिन Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	
1	PNPM	Pusat
2	LMDH	Propinsi
3	Kopontren	Propinsi
4	Bantuan Keuangan Desa	Propinsi
5	Jaring Aspirasi	Propinsi
6	Jalin Kesra	Propinsi
7	Penanganan PSK	Propinsi
8	PMKS	Kabupaten
9	PKHP	Kabupaten
10	Japes Mandiri	Kabupaten
11	PADT Kepulauan	Kabupaten
12	UPPKS	Kabupaten
13	PIPEK	Kabupaten

C	Program Penganggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil	
1	KUR	Pusat
2	KUBE	Pusat
3	Dagulir	Propinsi
4	Penjaminan Kredit oleh PT. Jamkrida	Propinsi
5	Lingkage Bank Jatim dengan BPR Jatim	Propinsi
6	Kopwan	Propinsi
7	Bantuan Keuangan untuk 25 UMKM	Kabupaten
8	Bantuan Modal untuk 80 Orang Hampir Miskin	Kabupaten

Sumber: Bappeda Kabupaten Sumenep 2014

Keberlangsungan semua program tersebut akan terus dijaga melalui program-program pendukung lainnya yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Sumenep. Untuk melihat pelaksanaan dan capaian secara keseluruhan penanggulangan kemiskinan oleh tim TKPKD Kabupaten Sumenep, berikut disajikan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Sumenep.

KONSEP DAN UKURAN KEMISKINAN

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai *Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society* (Sumodiningrat, 1999). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kemiskinan-an terkait dengan batas absolut standar hidup sebagian masyarakat miskin dan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Ketidakmampuan tersebut ditunjukkan oleh kondisinya yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan. Garis kemiskinan merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan, setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Kemiskinan merupakan konsep dan masalah yang multiperspektif. Dalam perspektif ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks ini, sumber daya tidak hanya berupa aspek finansial, melainkan semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dalam arti luas. Dengan indikator materi, seperti kepemilikan harta benda, *income* perkapita maupun konsumsi. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator konsumsi sebesar 2.100 kalori/orang setiap hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu, atau pendekatan Bank Dunia yang

menggunakan standar 1 dolar AS/ orang setiap hari. Contoh kemiskinan ini adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan beserta akses lain, seperti kesehatan, pekerjaan maupun pendidikan.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok untuk mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Keterbatasan individu karena adanya faktor penghambat berupa faktor internal yang bersumber dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya pendidikan dan adanya hambatan budaya. Sedangkan, faktor eksternal berasal dari luar kemampuan seseorang tersebut, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang mendapatkan sumber daya. Secara sederhana kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial dimaknai sebagai kemiskinan yang pada awalnya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, oleh karena terlalu lama dalam kondisi miskin baik karena faktor tidak disengaja, disengaja maupun karena dipelihara menyebabkan efek domino, berupa patologi atau masalah sosial. Sedangkan resiko ketika kemiskinan sudah menjadi masalah sosial adalah selain harus menyelesaikan masalah ekonomi itu sendiri juga mengatasi masalah sosial yang timbul. Contoh munculnya kriminalitas, budaya malas, korupsi, disparitas sosial yang menyebabkan konflik, dan ketergantungan pada pihak lain.

Kemiskinan juga dapat dipandang dalam perspektif sebab dan akibat. Sebagai sebab, kemiskinan merupakan akar dari sebagian besar tindak kriminalitas. Fenomena

pencurian, perampokan atau pembunuhan, dan kasus-kasus bunuh diri atau kelaparan disebabkan oleh kemiskinan. Sebagai akibat, kemiskinan merupakan suatu produk praktek ketidakadilan. Ketidakadilan pemimpin, hukum atau sistem, bahkan ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan menempatkan orang miskin sebagai 'sampah' yang tidak perlu dipikirkan. Sehingga, pemimpin seperti ini hanya akan mementingkan kepentingan dirinya dan orang-orang disekitarnya, tidak peduli jutaan orang merintih dalam kemiskinannya.

Ketidakadilan hukum akan menempatkan orang miskin dalam posisi lemah. Apalagi jika hukum bisa dijualbelikan, maka keberadaan orang miskin akan semakin sulit mendapatkan akses struktural yang mengeksklusi dirinya. Ketidakadilan sistem akan membuka peluang orang miskin tertindas, karena dalam sistem yang tidak adil, terjadi hukum rimba; yang kuat dan berkuasa.

Dengan demikian, secara umum kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Sulistiyani, 2004).

KONDISI KEMISKINAN MULTI-DIMENSI

Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

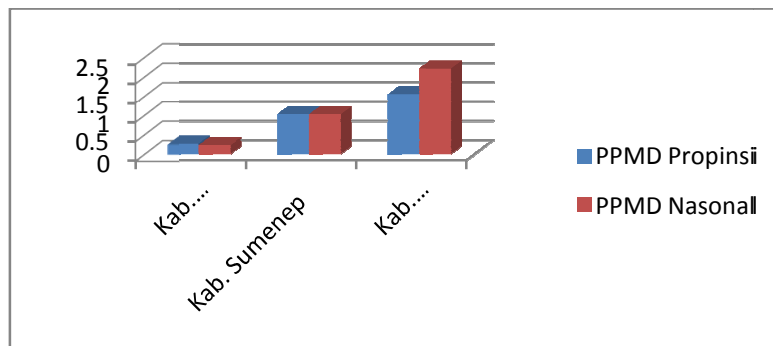
Muara dari pelaksanaan pembangunan disegala bidang adalah penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan. Banyak dampak (*Multieffect*) yang akan dihasilkan jika kemiskinan suatu wilayah sangat tinggi diantaranya;

penyakit sosial masyarakat (kriminalitas, prostitusi, dan pengemis), rendahnya permintaan (*demand*) dan penawaran (*suuply*), dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebesar 1,4% dari total penduduk termasuk dalam kategori sedang jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Timur dimana kategori tertinggi adalah Kabupaten Sampang sebesar 1,39% dan terendah Kabupaten Madiun sebesar 0,27%. Sedangkan untuk tingkat nasional tertinggi Kepulauan Mentawai sebesar 2,23 dan terendah Kota Denpasar sebesar 0,23%.

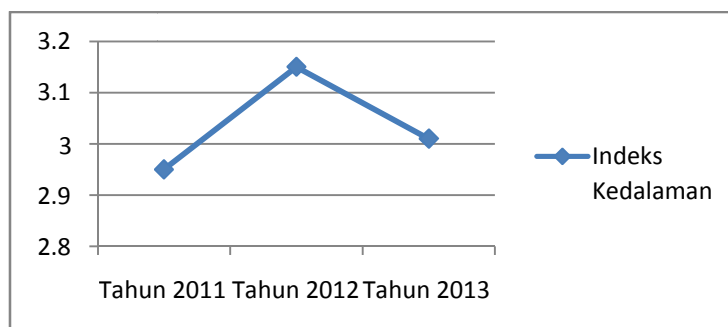
Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumenep juga mengalami

fluktuasi dari tahun 2011-2013, dimana pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,15 dari sebelumnya 2011 yang hanya sebesar 2,95. Namun pada tahun 2013 dengan intervensi Pemerintah kabupaten Sumenep yang dituangkan dalam RPJMD dan rencana tahunannya melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang dibagi dalam beberapa kluster seperti; (1) bantuan sosial terpadu terpadu berbasis Keluarga, (2) penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan (3) penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro kecil, akhirnya indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan ke angka 3,01.



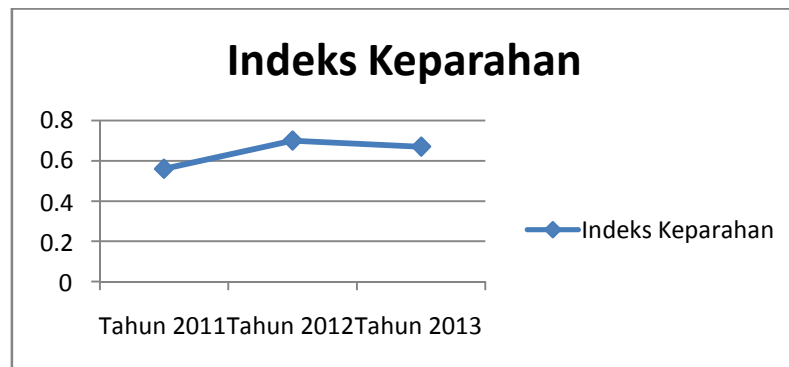
Sumber: Sumenep dalam Angka, 2014

Gambar 1. Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sumenep, Propinsi dan Nasional Tahun 2013



Sumber: Sumenep dalam Angka, 2014

Gambar 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumenep Tahun 2013



Sumber: Sumenep dalam Angka, 2014

Gambar 3. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Sumenep Tahun 2013

Sedangkan kalau dilihat dari indeks keparahan, dimana rentangnya antara 0-1 yang berarti semakin mendekati angka satu maka kategorinya semakin parah dan begitu juga sebaliknya jika mendekati nol, maka semakin rendah keparahannya, kemiskinan di Kabupaten Sumenep termasuk kategori cukup parah, dan bahkan tahun 2012 mendekati angka sangat parah sebesar 0,7, namun pada tahun 2013 mengalami perbaikan ke angka 0,67 setelah adanya intervensi Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui program penanggulangan kemiskinan seperti diatas tersebut. Jika dibandingkan dengan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan propinsi dan nasional maka indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumenep irama fluktuasinya hampir sama karena pada tahun yang sama yaitu tahun 2012 semuanya mengalami kenaikan angka indeks. Sedangkan fluktuasi perbaikan angka indeks di tahun 2013 Kabupaten Sumenep termasuk kategori cukup baik sebesar 0,03 untuk indeks keparahan jika dibandingkan dengan rata-rata propinsi dan nasional yang juga sebesar 0,03.

Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan sangat menentukan bagi peningkatan kualitas

sumber daya manusia sebagai aktor penggerak pembangunan karena semakin tinggi kualitas sumber daya manusia aktor penggerak pembangunan, maka semakin cepat pula percepatan pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Jika dilihat dari capaian indikator pendidikan Kabupaten Sumenep yang harus mendapat perhatian lebih adalah indikator angka putus sekolah SLTP/MTs yang mencapai 0,51% dari total murid dibandingkan dengan angka putus sekolah SD/MI yang hanya 0,34% dan SMU/SMK/MA sebesar 0,48% walaupun masih dalam kategori rendah dibawah 1% dibandingkan angka putus sekolah nasional yang diatas 5%. Namun yang paling menggembirakan dari indikator pendidikan tersebut yaitu angka partisipasi Kasar dan Murni SD/MI sebesar 120,11% dan 103,65%, hal ini berarti bahwa semua anak (100%) usia sekolah SD/MI yaitu antara umur 7-12 tahun terserap kedalam dunia pendidikan dan bahkan 3,69% jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah SD/MI terisi oleh anak dibawah usia 7 tahun. Kondisi ini menunjukkan hal yang menggembirakan jika mengacu pada kepada Renstra Kemendikbud Tahun 2010-2014 yang hanya mematok APM

sebesar 95% untuk SD/MI dan 75% untuk tingkat SLTP sederajat.

Jika dibandingkan dengan indikator capaian Jawa Timur yang hanya 97,83% untuk APM SD/MI Kabupaten Sumenep lebih unggul walaupun untuk APM SLTP dan SMU sederajat masih berada di bawah capaian Jawa Timur.

Upaya Pemerintah kabupaten Sumenep dalam memperbaiki indikator pendidikan melalui program-program sinergitas dengan program pemerintah pusat. Program Beasiswa untuk SMA Negeri dan Swasta dari pusat untuk mengurangi angka putus sekolah kemudian ditindaklanjuti dengan beasiswa perguruan tinggi oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan harapan bahwa akan banyak lulusan SMA/SMK/MA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga tercipta SDM yang berkualitas. Program Keluarga Harapan dari pusat untuk meningkatkan daya beli (*purchasing power*) terhadap akses pendidikan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui program

Bantuan untuk Keluarga Rentan, bantuan Modal untuk 80 orang hampir miskin. Bantuan keluarga rentan dan modal untuk 80 orang hampir miskin dimaksudkan untuk menghindarkan masyarakat dari jurang kemiskinan karena diibaratkan mereka berada di bibir jurang melalui bantuan permodalan usaha agar menjadi penghasilan tambahan (*pasif income*) disamping penghasilan utamanya.

Indikator pendidikan lainnya yang harus mendapatkan perhatian lebih yaitu angka buta huruf penduduk usia 15+ sebesar 0,17% dari total penduduk. Seharusnya target pemerintah di Tahun 2013 sudah tercapai “Sumenep bebas dari buta huruf”, namun terbatasnya anggaran dan sulitnya dalam menentukan pendekatan terbaik (*best approach*) untuk efektifitasnya program menjadi penyebab utama belum tercapainya target indikator pendidikan tersebut. Namun yang patut diapresiasi bahwa capaian Kabupaten Sumenep untuk pemberantasan buta huruf lebih bagus dari capaian Jawa Timur yang masih 9,51%.

Tabel 2. Capaian Indikator Pendidikan kabupaten Sumenep Tahun 2013

INDIKATOR	CAPAIAN DAERAH 2013	CAPAIAN PROVINSI 2013
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	120,11	112,70
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	97,75	102,22
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK/MA (%)	72,78	73,21
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	103,69	97,83
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	70,03	86,07
Angka Partisipasi Murni (APM) SMU/SMK/MA (%)	57,60	78,21
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun	387	16.706
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 13-15 Tahun	244	9.670
Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun	173	6.420
Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+(%)	0,17	9,51

Sumber: Sumenep dan Jatim dalam Angka, 2014

Dimensi Kesehatan

Kesehatan bagi manusia adalah hal yang utama, karena dengan kesehatan maka manusia bisa melakukan kegiatan produksi (produktif). Oleh karena pemerintah harus berupaya menjaga dan menjamin kesehatan masyarakatnya agar produktifitas mereka tinggi dan berdampak pada penyediaan output daerah sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat dari capaian indikator kesehatan penduduk Kabupaten Sumenep, maka intervensi prioritas tertuju pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, dimana angkanya mencapai 57 jiwa yang berarti bahwa 5,7% bayi yang dilahirkan meninggal. Penyebab utama dari kejadian ini karena keterlambatan bantuan penanganan medis karena kebanyakan penduduk menganggap bahwa biaya persalinan tinggi sehingga mereka memilih persalinan tanpa bantuan tenaga medis.

Indikator lainnya yang cukup tinggi adalah angka morbiditas sebesar 1,70% yang berarti bahwa dari total penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1,70% sedang mengalami gangguan kesehatan dan sedang dirawat di rumah sakit. Penyebab utama dari kejadian ini adalah pola hidup yang tidak sehat seperti kurang menjaga lingkungan, rendahnya sanitasi dan kurangnya air bersih.

Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui sinergitas program penanggulangan kemiskinan dengan pemerintah pusat, misalnya: program Jamkesmas oleh pemerintah pusat untuk membantu akses pengobatan masyarakat ditindaklanjuti melalui program Jampersal oleh pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membantu

biaya persalinan masyarakat miskin sehingga diharapkan mampu mengurangi angka kematian bayi saat dilahirkan.

Disamping itu Pemerintah kabupaten Sumenep juga mengoptimalkan program-program yang dilakukan pemerintah pusat seperti Air Bersih untuk Rakyat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan melalui ketepatan sasaran dan evaluasi yang rutin agar tingkat morbiditas bisa terus berkurang. Peningkatan kehidupan masyarakat miskin sangat penting guna menciptakan iklim kegiatan ekonomi yang kondusif, karena dengan masyarakat yang sehat maka produktifitasnya juga akan tinggi dalam menghasilkan output ekonomi yang nantinya akan bermuara pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Capaian Kabupaten Sumenep dalam penganggulangan kemiskinan cukup bagus jika dibandingkan dengan capaian Jawa Timur dimana indikator Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 jiwa sebesar 2 jiwa, Angka Morbiditas sebesar 1,7%, dan Prevelensi DBD per 1000 penduduk sebesar 4,6% berada di atas capaian Jawa Timur meskipun beberapa capaian seperti Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Proporsi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih, dan Prevelensi Balita Kurang Gisi masih berada di bawah capaian Jawa Timur. Letak geografis Kabupaten Sumenep dimana separuh wilayahnya adalah kepulauan dengan tingkat mobilitas orang dan barang yang tidak selancar wilayah daratan menjadi penghambat utama dalam mencapai target indikator bidang kesehatan dibanding wilayah di Jawa Timur lainnya yang wilayahnya hanya daratan.

Tabel 3. Capaian Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2013

INDIKATOR	Capaian Daerah 2013	Capaian Provinsi 2013
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (Jiwa)	5	3
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup (Jiwa)	57	27
Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 Balita (Jiwa)	2	2,7
Proporsi Kelahiran yang ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)	81	94
Angka Morbiditas (%)	1,7	2,1
Proporsi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)	9,6	8,3
Prevelensi DBD per 1000 Penduduk (%)	4,6	6,2
Prevalensi Balita Kurang Gisi (%)	2,7	2,2

Sumber: Sumenep dan Jatim dalam Angka 2014

Dimensi Prasarana Dasar

Prasarana wilayah sangat penting bagi aktifitas kegiatan perekonomian, dimana semakin lengkap dan bagus ketersediaan prasarana maka akan memperlancar akses kegiatan ekonomi masyarakat. Semakin lancar kegiatan ekonomi masyarakat maka akan mempercepat transaksi ekonomi, semakin cepat transaksi ekonomi maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat tercapai. Jika dilihat dari capaian indikator prasarana dasar maka yang harus jadi prioritas penanganan ke depan adalah akses rumah tangga terhadap layanan listrik, ketersediaan jalan poros desa yang bisa dilalui roda 4 (R4), dan akses masyarakat terhadap air bersih.

Upaya yang dilakukan pemerintah disamping membuat program sinergitas sendiri dengan pemerintah pusat yang focus untuk peningkatan prasarana dasar wilayah kepulauan melalui program PADT Kepulauan yang memang sangat tertinggal jika dibandingkan dengan

prasarana dasar wilayah daratan, juga mengawal dan melaksanakan kegiatan pemerintah pusat seperti; PNPM, Air Bersih untuk Rakyat, dan Listrik Murah Hemat.

Kegiatan PNPM diarahkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan penting masyarakat seperti jalan makadam, rabat beton, MCK dsb. Sedangkan Air Bersih untuk Rakyat dan Listrik Murah Hemat diarahkan pada daerah-daerah yang memang belum terjangkau air bersih dan listrik utamanya wilayah pinggiran dan pesisir kepulauan Kabupaten sumenep. Untuk penyediaan listrik wilayah kepulauan pemerintah Kabupaten Sumenep saat ini berupaya terus mengembangkan listrik tenaga matahari pemanfaatan biogas untuk aliran listrik.

Kendala utama untuk penyediaan prasarana dasar adalah perawatannya, dimana masyarakat kadangkala tidak peduli terhadap perawatan dan keberlangsungan prasarana dasar tersebut.

Tabel 4. Capaian Indikator Prasarana Dasar Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2013

INDIKATOR	Capaian Daerah 2013	Capaian Provinsi 2013
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	88,88	95,01
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	29,49	82,55
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	62,3	90,7
Proporsi Desa dengan Akses Jalan R4 Sepanjang Tahun (%)	54,1	74,2
Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)	57,06	76,4
Aksesibilitas Pasar Tradisional (KM)	4,1	3,2

Sumber: Sumenep Dalam Angka, 2014

Capaian Kabupaten Sumenep dalam bidang penyediaan prasarana dasar lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Jawa Timur secara keseluruhan. Hal yang paling mencolok adalah indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, akses listrik, dan akses jalan R4 sepanjang tahun dimana besarnya masing-masing 29%, 62,3%, dan 54,1% jauh dari capaian Jawa Timur dimana proporsi rumah tangga dengan akses listrik hampir mencapai 100% yaitu 90,7%, sanitasi layak 82,55%, dan proporsi desa dengan akses jalan R4 sebesar 74,2%. Hal ini juga disebabkan karena wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep memang sulit dicapai oleh jaringan listrik PLN dan transportasi utama masyarakatnya adalah transportasi laut.

Dimensi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara, propinsi, maupun kabupaten/ kota. Besaran indeks ketahanan pangan berada di rentang 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 maka wilayah tersebut termasuk dalam kategori ketahanan pangannya tinggi, namun sebaliknya jika angka indeksnya semakin mendekati 0 maka wilayah tersebut termasuk dalam kategori rawan pangan.

Penentu ketahanan pangan diantaranya; akses (fisik dan ekonomi) terhadap pangan, dan ketersediaan pangan dan resiko terkait dengan akses serta ketersediaan pangan tersebut. Indikator ketahanan pangan juga dapat dilihat dari pangsa pengeluaran rumah tangga, semakin besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga semakin rendah ketahanan pangannya.

Jika dilihat dari capaian indikator ketahanan pangan maka Kabupaten Sumenep dengan besaran indeks ketahanan pangan 0,83 hampir sama dengan capaian ketahanan pangan Jawa Timur yang masuk dalam kategori ketahanan pangan cukup tinggi. Ini berarti bahwa akses masyarakat terhadap pangan cukup bagus, dan resiko terkait dengan akses ketersediaan pangan relative rendah.

Capaian lainnya seperti produktivitas padi/ bahan pangan yang lain juga hampir sama dengan capaian Jawa Timur dengan rentang hanya 0,3 ton/ha yang berarti bahwa untuk bahan pangan Kabupaten Sumenep produktivitasnya cukup tinggi. Harga-harga kebutuhan pokok juga relatif hampir sama dengan wilayah Jawa Timur lainnya dengan rentang perbedaan yang sangat kecil yang berarti bahwa faktor biaya transportasi memang berpengaruh terhadap harga jual produk di suatu wilayah.

Tabel 5. Capaian Indikator Ketahanan Pangan Penduduk Kabupaten Sumenep Tahun 2013

INDIKATOR	Capaian Daerah 2013	Capaian Provinsi 2013
Indikator Ketahanan Pangan (0-1)	0.83	0,85
Produktivitas Padi/Bahan Pangan Lain (ton/ha)	5,6	5,9
Harga Beras Kualirta Rata-rata (Rp)	8.575	8.345
Harga Barang Kebutuhan Pokok:		
1. Telur (Rp)	16.000	15.800
2. Daging Sapi (Rp)	78.000	73.000
3. Minyak Goreng (Rp)	13.750	12.900
4. Gula Pasir (Rp)	9.700	9.500
5. Tepung Terigu (Rp)	7.260	6.800

Sumber: Sumenep dalam Angka diolah, 2014

PROGRAM DAN EVALUASI APBD UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Program Penanggulangan Kemiskinan daerah

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ini terbagi 2 berdasarkan sumber pembiayaannya; yaitu program-program inisiatif daerah dan program-program yang diluncurkan Pemerintah Pusat. Berdasarkan penggolongan klaster dalam Penanggulangan Kemiskinan, maka terbagi atas 3 klaster yaitu:

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Dalam skema program Penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis keluarga merupakan skema klaster 1, dimana program ini ditujukan kepada golongan masyarakat rentan; seperti Kepala Keluarga yang lanjut usia, perempuan serta keluarga yang sangat miskin ataupun sulit untuk diberdayakan. Dalam skema ini terdapat program pemerintah pusat seperti Program

Raskin (Beras Untuk Keluarga Miskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Beasiswa bagi Siswa SMA Negeri/Swasta dari Keluarga Miskin.

Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu dengan mengeluarkan program yang bersinergi dengan program pemerintah pusat diantaranya:

a. Program Beasiswa Perguruan Tinggi dan Bantuan untuk Guru Ngaji

Program ini menurunkan (*break-down*) dan melengkapi dari program pusat untuk beasiswa SMA, dimana harapannya adalah siswa SMA tidak putus sekolah dan setelah lulus SMA mereka mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi agar tercipta generasi yang lebih berkualitas sebagai actor penggerak roda pembangunan. Sedangkan program bantuan untuk guru ngaji diluncurkan untuk merangsang tumbuh kembangnya pendidikan berbasis rokhani untuk menciptakan generasi pintar yang berakhlak mulia yang mana pendidikan ini

sangat terbatas untuk diperoleh di bangku sekolah formal.

Keberhasilan dari program ini dapat dilihat dari angka putus sekolah yang semakin turun untuk anak SMA dari tahun 2011 sebesar 393 siswa menjadi 374 siswa untuk tahun 2013.

- b. Program Bantuan social untuk Pedagang Eceran Keliling, Bantuan untuk Kesejahteraan Lansia, dan Bantuan Social untuk Orang Terlantar, Cacat Psikotik, Pemulung dan Keluarga Rentan
Program ini melengkapi program pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dimana komunitas tertentu yang tidak mampu tertampung dalam program PKH karena keterbatasan anggaran pusat kemudian bisa ditampung oleh anggaran pemerintah Kabupaten Sumenep melalui kegiatan sejenis. Program ini dikeluarkan guna menurunkan tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Sumenep baik dilihat dari indeks kedalaman maupun keparahan kemiskinannya. Keberhasilan program ini bisa

dilihat dari semakin turunnya indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Sumenep dari tahun 2012 sebesar 3,15 menjadi sebesar 3,01 pada tahun 2013, dan begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang turun dari angka 0,7 pada tahun 2012 menjadi 0,67 pada tahun 2013.

- c. Jampersal
Program Jampersal diluncurkan untuk melengkapi program pemerintah pusat Jamkesmas, dimana jangkauan anggaran Jamkesmas masih rendah dalam menjangkau biaya pengobatan masyarakat sehingga lahirnya Jampersal yang dikhususkan untuk pembiayaan persalinan membantu kelancaran ibu-ibu pada saat proses persalinan dari segi biaya. Keberhasilan dari program ini bisa dilihat dari angka kematian ibu melahirkan yang sangat rendah yaitu hanya sebesar 5 jiwa dari setiap 100.000 kelahiran hidup, dan prosentase angka Morbiditas yang hanya ,1,7% dari total penduduk Kabupaten Sumenep.

Tabel 6. Klaster 1 (Program Nasional Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga dan Rumah Tangga)

	PROGRAM NASIONAL			
	Program 1	Program 2	Program 3	Program 4
Jenis Transfer	Beasiswa Miskin SMA Negeri/ Swasta	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Program keluarga Harapan	Beras Untuk Keluarga Miskin
Sasaran	Siswa SMA dari Keluarga Miskin	Masyarakat Miskin	Keluarga Miskin	Keluarga Miskin
Lembaga/ SKPD Pelaksana	Bappeda	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Kantor Kecamatan

Tabel 7. Klaster 1 (Program Daerah Perlindungan Sosial Berbasis Individu, Keluarga dan Rumah Tangga)

	PROGRAM DAERAH				
	Program 1	Program 2	Program 3	Program 4	Program 5
Jenis Transfer	Basiswa Perguruan Tinggi	Bantuan Untuk Guru Ngaji	Bantuan Sosial untuk Pedagang Eceran	Bantuan Sosial bagi Orang Terlantar, Cacat, Psikotik, Pemulung dan Keluarga Rentan	Jampersal
Sasaran	Mahasiswa dari Keluarga Miskin	Guru ngaji	Pedagang Eceran Keliling	Orang terlantar, Cacat, Psikotik, Pemulung, dan Keluarga Rentan	Ibu-Ibu yang akan Melahirkan
Lembaga/SKPD Pelaksana	Bappeda	Bappeda	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Dalam skema program Penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan skema klaster 2, dimana program ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat ditujukan penyediaan Prasarana Dasar masyarakat miskin, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, Air Bersih Untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Rumah Sangat Murah dan Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Wilayah Perkotaan

Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu

dengan mengeluarkan program yang bersinergi dengan program pemerintah pusat diantaranya: PMKS, PKHP, Japes mandiri, PADT Kepulauan, UPPKS, dan PIPEK. Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terpencil dan kepulauan terhadap Prasarana Dasar yang selama ini masih terasa ketimpangannya jika dibandingkan dengan masyarakat wilayah perkotaan dan daratan Kabupaten Sumenep. Akses jalan desa yang bisa dilalui roda 4 terus berkembang hingga mencapai 67,05%, ketersediaan akses terhadap listrik terus diupayakan melalui pembangkit listrik tenaga surya yang sekarang sedang dikembangkan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep khususnya di Kecamatan Arjasa, Sapeken, Raas,

Kangayan, Masalembu dan Gili Genting.

Tabel 8. Klaster 2 (Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas)

	PROGRAM NASIONAL						
	Program 1	Program 2	Program 3	Program 4	Program 5	Program 6	Program 7
Jenis Transfer	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Program Rumah Sangat Murah	Kendaraan Angkutan Umum Murah	Air Bersih Untuk Rakyat	Listrik Murah dan Hemat	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Nelayan	Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan
Sasaran	Masyarakat Pedesaan	Keluarga Miskin	Masyarakat Pengguna Angkutan Umum	Masyarakat Pedesaan	Keluarga Miskin	Masyarakat Pesisir	Masyarakat Miskin Perkotaan
Lembaga/SKPD Pelaksana	Bappeda	PU Cipta Karya	Perhubungan	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda
	PROGRAM DAERAH						
	Program 1	Program 2	Program 3	Program 4	Program 5	Program 6	Program 7
Jenis Transfer	PMKS	PKHP	Japes Mandiri	PADT Kepulauan	UPPKS	PIPEK	Bantuan Renovasi Rumah untuk 150 Unit Rumah
Sasaran	Keluarga Miskin	Keluarga Miskin	Keluarga Miskin	Masyarakat Kepulauan	Keluarga Miskin	Keluarga Miskin	Keluarga Miskin
Lembaga/SKPD Pelaksana	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	PU Cipta Karya

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

Dalam skema program Penanggulangan kemiskinan berdasarkan klaster, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pem-

berdayaan usaha mikro, kecil merupakan skema klaster 3, dimana program ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil, seperti; Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu dengan mengeluarkan program yang bersinergi dengan program pemerintah pusat diantaranya:

- a. Bantuan Keuangan untuk 25 Usaha Mikro dan Kecil. Bantuan Keuangan untuk pelaku usaha mikro dan kecil melengkapi program pemerintah KUR, dimana akses KUR oleh pelaku usaha mikro dan kecil sangat sulit karena para pelaku usaha dituntut untuk bisa *Bankable* karena penyaluran KUR melalui bank-bank pemerintah terintegrasi dengan *Bank Indonesia Checking* dan harus memenuhi syarat kriteria pembiayaan perbankan. Bantuan keuangan ini diharapkan mampu meningkatkan produktifitas dan skala produksi usaha mikro kecil, sehingga apabila usaha mikro dan kecil ini bisa berkembang maka diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mampu menambah ketersediaan output di Kabupaten Sumenep. Meningkatnya lapangan

pekerjaan dan output daerah pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonom daerah.

- b. Bantuan Modal untuk 80 orang hampir miskin

Bantuan modal untuk 80 orang yang hampir miskin juga melengkapi program pemerintah pusat karena bantuan modal ini juga ditujukan bagi rumah tangga yang mempunyai usaha namun tidak mampu mengembangkan usaha rumahnya tersebut karena terkendala permodalan. Tujuan utama dari program ini adalah merangsang masyarakat hampir miskin untuk mengembangkan usaha sampingannya sebagai *pasif income*, sehingga apabila pendapatan utamanya terganggu masih bisa ditopang oleh pendapatan sampingannya yang akhirnya bisa terhindar dari jurang kemiskinan.

Keberhasilan dari kedua program diatas bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten sumenep dari tahun 2011-2013 yang mampu tumbuh sebesar 6,34%.

Tabel 9. Klaster 3 (Program Pemberdayaan Berbasis Usaha Mikro Kecil)

	PROGRAM NASIONAL	
	Program 1	Program 2
Jenis Transfer	Kredit Usaha Rakyat	Kelompok Usaha Bersama
Sasaran	Pelaku UMKM	Pelaku UMKM
Lembaga/SKPD Pelaksana	Bank Pemerintah	Dinas Koperasi dan UMKM
		PROGRAM DAERAH
	Program 1	Program 2
Jenis Transfer	Bantuan Keuangan untuk 25 UMKM	Bantuan Modal untuk 80 Orang hampir Miskin
Sasaran	Pelaku UMKM	Keluarga Rentan
Lembaga/SKPD Pelaksana	Dinas Koperasi dan UMKM	Bappeda

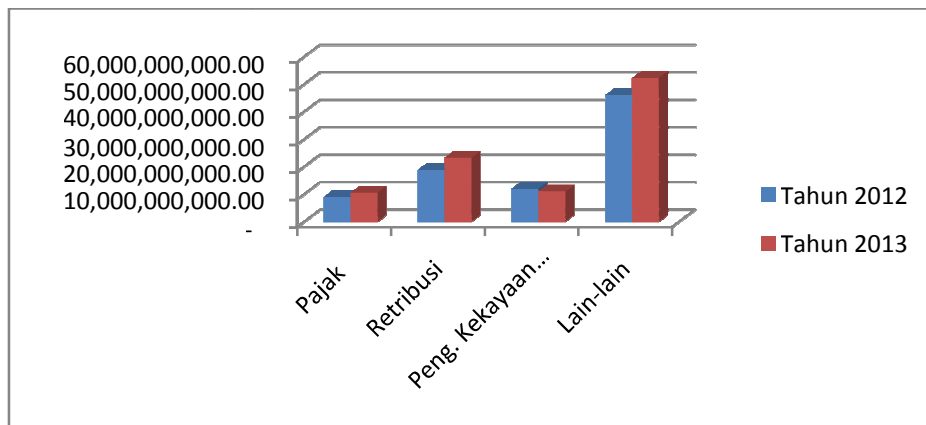
Evaluasi APBD untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pendapatan Daerah

Realisasi penerimaan asli daerah (PAD) menggambarkan suatu wilayah mandiri atau tidak dalam ruang fiskalnya, karena jika indeks ruang fiskalnya rendah maka ketergantungan wilayah tersebut kepada pemerintahan pusat sangat tinggi, begitu juga sebaliknya.

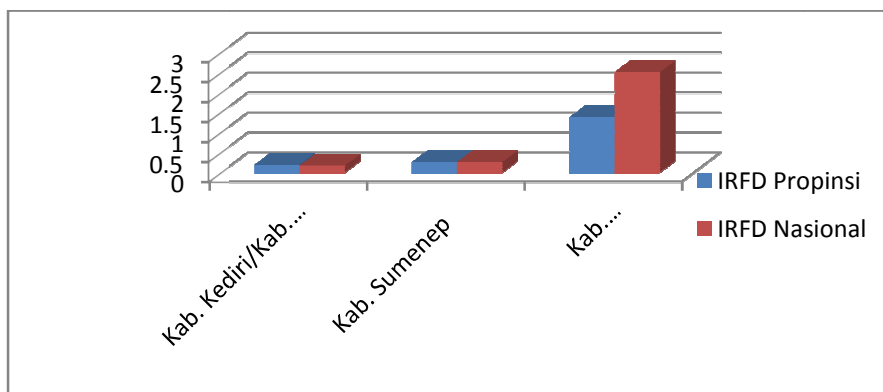
Dilihat dari komposisi dan postur PAD Kabupaten Sumenep maka

dapat dihitung besaran Indeks Ruang Fiskal Daerah (IRFD) yaitu sebesar 0,27. Besaran IFRD tersebut jika dibandingkan dengan IFRD nasional maka termasuk dalam kategori kemandiriannya rendah, yang berarti ketergantungannya terhadap pusat relative tinggi. Untuk kategori nasional kemandirian fiskal tertinggi berada di Kota Sawah Lunto Propinsi Sumbar dengan besaran IFRD 2,52, dan terendah Kabupaten Ciamis dengan besaran IFRD 0,18.



Sumber: Sumenep dalam Angka 2014

Gambar 4. Komposisi Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep Tahun 2013



Sumber: Kementerian Keuangan, 2014

Gambar 5. Indeks Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013

Rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Sumenep menyebabkan kurang luasnya dalam menentukan inisiatif program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Demikian pula rendahnya kemandirian fiskal tersebut menyebabkan pemerintah Kabupaten Sumenep kurang begitu mampu menjamin bahwa keberlangsungan program penganggulangan kemiskinan daerah bisa terus terwujud.

Upaya yang dilakukan pemerintah disamping mengawal program pusat agar efektif dan tepat sasaran, juga berusaha memperbaiki derajat kemandirian fiskalnya melalui optimalisasi pungutan pajak, redistribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah serta mencari peluang pendapatan daerah dari lain-lain yang sifatnya syah.

Pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilimpahkan ke daerah oleh Kementerian Keuangan diharapkan mampu dikelola secara optimal dan besarnya sesuai dengan target pemerintah Kabupaten Sumenep agar mampu memperbaiki derajat kemandirian fiskalnya.

Upaya menaikkan pungutan pajak dan redistribusi dilakukan secara bertahap namun pada tingkat kewajaran,

sehingga tidak menambah beban bagi masyarakat dan iklim investasi tetap kondusif.

Analisis Belanja Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan

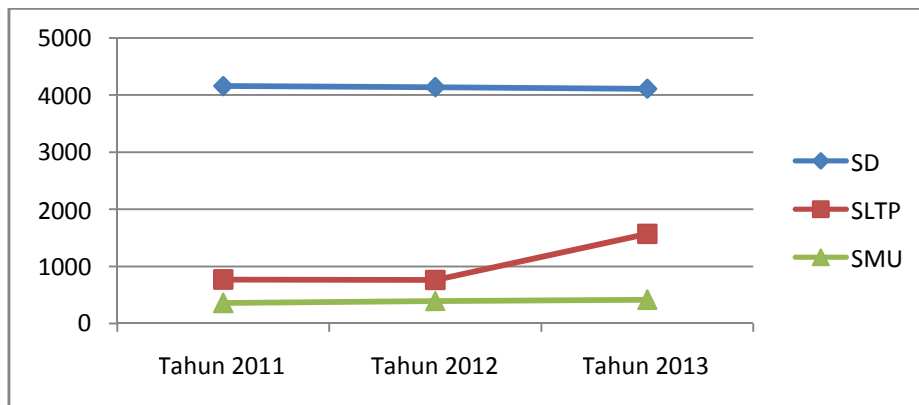
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan kemudian direvisi lagi menjadi Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang tentang penyusunan APBD mengharuskan bahwa Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum harus mendapatkan anggaran prioritas karena tiga klaster program penanggulangan kemiskinan pelaksanaannya nempel pada ketiga sector tersebut.

Postur APBD Kabupaten Sumenep sudah menerapkan aturan tersebut dalam penyusunannya, dimana Dinas Pekerjaan Umum mendapat distribusi anggaran yang paling besar 22% guna penyediaan prasarana dasar penduduk, kemudian Bidang Kesehatan mendapatkan alokasi pendanaan sebesar 12%, dan yang tertinggi no 3 adalah bidang pendidikan dengan pendanaan sebesar 11%.



Sumber: Sumenep Dalam Angka, 2014

Gambar 6. Postur APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2013



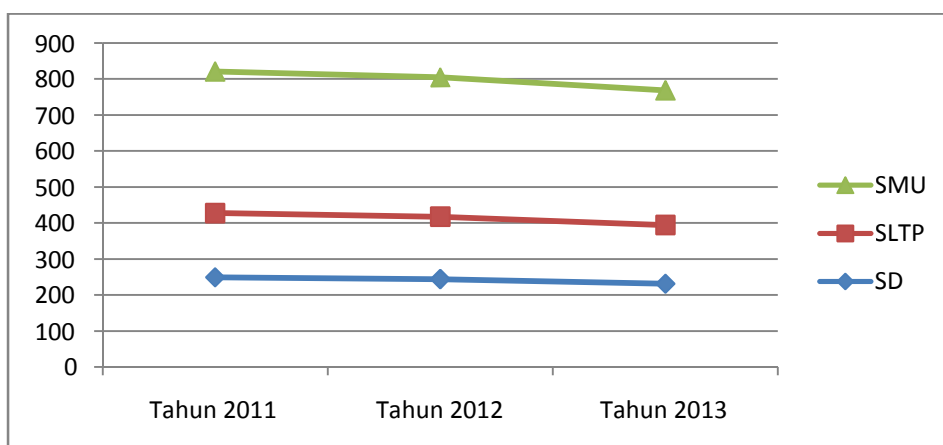
Sumber: Sumenep Dalam Angka, 2014

Gambar 7. Peningkatan Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SMU sederajat di Kabupaten Sumenep Tahun 2013

Dampak alokasi dana untuk pendidikan bisa terlihat dari tingkat penyediaan ruang kelas yang terus meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013 terutama untuk jenjang SLTP sederajat sebesar 51,5% dan SMU sederajat sebesar 5,78%. Peningkatan ini menjawab kebutuhan akan ruang kelas SLTP yang semakin besar angka partisipasinya sehubungan dengan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (WAJAR).

Pendanaan Program Bantuan Social dalam bentuk beasiswa

untuk perguruan tinggi, bantuan untuk Guru Ngaji, bantuan social untuk pedagang eceran keliling, bantuan untuk keluarga rentan, bantuan keuangan untuk 25 UMKM dan bantuan modal untuk 80 orang hampir miskin mampu membuat masyarakat lebih berdaya dan terjadi peningkatan pada daya belinya (*purchasing power*) termasuk daya beli pada akses pendidikan dan kesehatan anaknya sehingga berdampak pada angka partisipasi sekolah yang tinggi dan penurunan angka putus sekolah pada berbagai jenjang pendidikan.



Sumber: Sumenep dalam Angka 2014

Gambar 8. Angka Putus Sekolah Jenjang SD,SLTP,dan SMU Sederajat Tahun 2013

SIMPULAN

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumenep dibagi dalam 3 klaster diantaranya: Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, (2) beberapa capaian telah diraih dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten Sumenep, diantaranya; Capaian Indikator Pendidikan Penduduk, Capaian Indikator Kesehatan Masyarakat, Capaian Indikator Prasarana Dasar, dan Capaian Indikator Ketahanan Pangan, dan (3) Postur APBD Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan kemudian direvisi lagi menjadi Permendagri No.37 Tahun 2014 tentang tentang penyusunan APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Sumenep Dalam Angka. Sumenep*.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Jawa Timur Dalam Angka*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Bellinger, W. K. 2007. *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon.
- De Fina, Robert H. 2002. *The Impact Of Unemployment On Alternatif Poverty Measures*. Working Paper. Departement Reseach Federal Reserve Bank Of Filadelfia.
- Kakwani N, Pernia EM. 2000. What is pro-poor growth? *Asian Development Review* **18** (1): 1-16.
- Octaviani, Dian. 2001. Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Indeks ForresterGreer & Horbecke, *Media Ekonomi* **7** (8): 100-118.
- Oreggia E Rodriguez and Andres Rodniguez-Pose. 2004. The Regional Return of Public Investment Policies in Mexico. Elsevier Ltd. *World Development* **32** (9): 1545-1562.
- Oshima, Herry. 1990. Population and Inequality In East Asia. *Malayan Economic Review* **15**: 7-41
- Osinubi, Tokunbo Simbowale. 2005. Macroeconometric Analysis Of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria. *Pakistan Economic and Social Review*. **XLIII** (2): 249-269.
- Perry GE, Arias OS, Lopez JH, Maloney WF, Serven L. 2006. *Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles*. New York: World Bank .
- Ravallion M. 2006. Inequality is Bad for The Poor. *World Bank Policy Research Working Paper* 3677.
- Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sekretariat Negara RI. 2003. *UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Pokok Ketenagakerjaan*. Jakarta
- Sen A. 1995. A Sociological Approach to The Meaurement of Poverty: A Reply to Professor Peter

- Townsend. *Oxford Economic Papers* 37: 669-676.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, MP dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga 1*. Edisi ke Delapan. Jakarta: Erlangga.
- Warr P. 2006. Poverty and growth in southeast asia. *ASEAN Economic Bulletin* 23: 279–302.
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. Jakarta: Indopov